

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami tentang skripsi ini, maka perlu adanya peneliti dalam menguraikan terlebih dahulu mengenai arti dan makna dari beberapa istilah-istilah guna adanya penegasan arti dan maksud yang terkait dengan tujuan penulisan ini, berdasarkan penegasan tersebut pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini sehingga tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, langkah ini pula merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: **“Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”**. Oleh sebab itu, istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti tercapainya suatu pekerjaan dan perbuatan yang telah direncanakan. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian-pencapaian tujuan yang telah ditentukan, efektivitas disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹

2. Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan

¹ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa,” 2008.

dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.²

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai dan non-tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat. Program keluarga harapan berupaya memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar masyarakat tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya.³

4. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan.⁴

5. Mengurangi

Mengurangi adalah suatu usaha untuk menurunkan atau menjadikan berkurang dalam mengatasi masalah.⁵

6. Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti mampu bekerja atau berusaha namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.⁶

² Alfuzukhrufu Firdausu, "Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1 (2021).

³ Muhammad Luthfi, "Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB)," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2, no. 1 (2019): 81–89.

⁴ Sulkan Yasin and Sunarto Hapsoyo, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosakata Baru," *Surabaya: Mekar*, 2008.

⁵ Yasin and Hapsoyo.

⁶ Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan* (Alprin, 2020).

7. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi islam adalah sudut pandang dari ekonomi islam. Ekonomi islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari tujuan hidup, sudut pandang hingga menganalisis masalah ekonomi. Ekonomi islam merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun berdasarkan pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi waktu dan lingkungan.⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diupayakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dibidang Pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih ditujukan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin. PKH memiliki dua fungsi yaitu fungsi jangka pendek dan fungsi jangka panjang. Fungsi jangka pendek bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran RTSM (Rumah tangga sangat miskin) dalam bentuk pemberian bantuan tunai dan non tunai bersyarat. Fungsi jangka panjang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin.⁸

⁷ Hilmiatus Sahla et al., "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Pionir* 5, no. 2 (2019).

⁸ Septiana Riyanti, "Implementasi Dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Program ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk menjadi KPM PKH ada Kriteria yang harus dimiliki oleh calon peserta PKH. Kriteria tersebut dibagi atas tiga komponen yaitu: komponen kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini), komponen pendidikan (anak usia sekolah SD, SMP, SMA sederajat) dan komponen kesejahteraan sosial (lansia dan penyandang disabilitas).

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terigister berdasarkan basis data terpadu rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut: Tidak mempunyai sumber mata pencaharian, atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, Mempunyai pengeluaran sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok dengan sangat sederhana, Tidak mampu untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah, Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga, Hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari kayu/bambu/tembok dengan kondisi yang kurang baik atau kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang dan tidak diplester, Kondisi lantai terbuat dari tanah/kayu/semen/keramik dengan kondisi kualitas yang tidak baik, Atap terbuat dari ijuk/genteng/seng/asbes dengan kondisi dan kualitas yang tidak baik, Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m² dan Sumber air minum berasal dari sumur/air sungai atau mata air yang tak terlindung.⁹

(Studi Kasus Pada Peserta PKH Kecamatan Pekalongan Barat)” (IAIN Pekalongan, 2019).

⁹ Rohana Widhi Lestari and Abu Talkah, “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar,” *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 229–41.

Berdasarkan Permensos RI nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, rumah tangga sangat miskin memiliki kewajiban yang harus dipenuhi antara lain: Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun dan Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Dalam Program Keluarga Harapan, manfaat bantuan yang diterima oleh penerima manfaat Program Keluarga Harapan terdiri dari beberapa item bantuan yaitu Pemberian bantuan uang non tunai yang nominal perolehan setiap Keluarga Sangat Miskin (KSM) berbeda-beda tergantung dari klasifikasi anggota keluarganya. Indeks Bansos Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Kementerian Sosial RI adalah Rp 3.000.000,-/tahun untuk Ibu Hamil, Rp 3.000.000,- untuk anak usia dini 0-6 Tahun, Rp 900.000,-/tahun untuk SD/ sederajat, Rp 1.500.000,-/tahun untuk SMP/ sederajat, Rp 2.000.000,- /tahun untuk SMA/ sederajat, Rp 2.400.000,-/tahun untuk Lansia diatas 70 tahun dan Rp 2.400.000/tahun untuk penyandang disabilitas berat.¹⁰

Program keluarga harapan dikelola oleh kementerian sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dikantor wakil presiden mulai mendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin.¹¹ Program Keluarga Harapan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin selain berinvestasi

¹⁰ Lestari and Talkah.

¹¹ Kementerian Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (On-Line) tersedia di <https://www.kemosos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf>

bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan Pendidikan, sasaran atau penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, masa nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin, dengan tujuan akhir PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Untuk meningkatkan partisipasi sekolah PKH harus dapat menjangkau mereka yang berada diluar sistem persekolahan termasuk mereka yang menjadi pekerja anak, terutama untuk daerah yang diduga banyak terdapat pekerja anaknya akan dibekali dengan pengetahuan berkaitan dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka kembali ke bangku sekolah. Komponen pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7–18 tahun belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri disekolah formal atau non formal serta hadir sekurang – kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu Program Nasional maupun lokal.

Dengan demikian PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi *supply* (pelayanan) dan *demand* (kebutuhan), Dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, kordinasi antar sektor, kordinasi antar tingkat pemerintah, serta antar pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggung jawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal. Pendidikan Anak dimulai dari anak usia dini (0-6 tahun) telah ada walaupun masih belum memadai. Data laporan UNICEF tentang Situasi Anak dan Perempuan tahun 2000 mencatat hanya

20% anak yang mengikuti pendidikan prasekolah dan terdapat 10-30% anak mengalami hambatan perkembangan verbal, mental, dan psikomotorik. Rendahnya kualitas anak usia dini ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya mutu pendidikan dan pengetahuan keluarga dalam menstimulasi perkembangan anak.

Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta, Meningkatkan taraf pendidikan peserta, Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas. Balita, dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Di lihat dari tujuan yang digulirkan program PKH diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan dan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di Negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan *sustainable*. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara, yang akan berbeda antara negara satu dengan Negara lainnya. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas.¹²

¹² Niuwa, W. M., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2020). The Influence of Government Expenditure in Education and Health Sector on The Poverty in Gorontalo. *Jambura Equilibrium Journal*, 1 (2), 47–52.

Konsep kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.¹³

Garis kemiskinan mendefinisikan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu persepsi masyarakat terhadap kebutuhan dasar (tingkat pendidikan dan kebutuhan dasar), adat istiadat, dan tempat tinggal masyarakat di lingkungan sekitarnya.¹⁴ Berdasarkan data konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan bukan merupakan masalah baru. Sesudah Indonesia merdeka, masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia, baik dari masa orde lama, orde baru bahkan sampai masa reformasi pada detik ini. Meskipun usaha demi usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan, namun masalah tersebut tetap hidup bersama bangsa ini.¹⁵ Berikut adalah jumlah penduduk di Desa Banjar Negeri dari tahun 2019-2022.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Banjar Negeri tahun 2019-2022
(Ribuan Jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)
1	2019	2.348
2	2020	2.382
3	2021	2.417

¹³ AAIN Mahaeni et al., "Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali," *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 10, no. 1 (2014): 8–18.

¹⁴ Rahmah Muin and Rosdiana Rosdiana, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2020): 130–47.

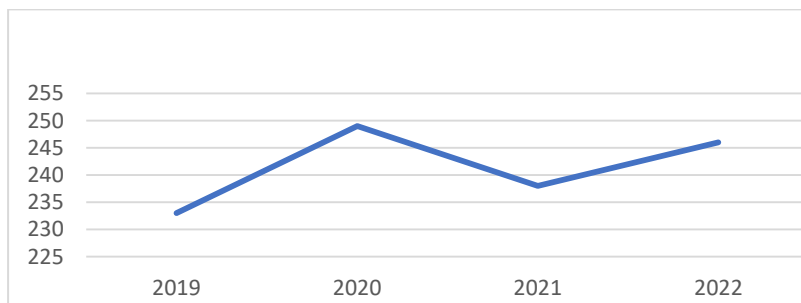
¹⁵ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84.

4	2022	2.457
---	------	-------

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri 2022.

Dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwa pertumbuhan penduduk di Desa Banjar Negeri terus mengalami kenaikan, pada tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Banjar Negeri yaitu 2.348 jiwa dan terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 jumlah penduduk di Desa Banjar Negeri berjumlah 2.457 jiwa. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan berdampak pada semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas dan memperburuk kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

Berikut grafik jumlah penduduk miskin di Desa Banjar Negeri dari tahun 2019-2022.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Desa Banjar Negeri Tahun 2019-2022 (Jiwa).¹⁶

Dilihat dari grafik 1.1 di atas jumlah penduduk miskin di Desa Banjar Negeri bersifat fluktuatif kondisi kemiskinan yang tidak tetap selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Desa Banjar Negeri sebanyak 233 jiwa, pada tahun 2020 mengalami kenaikan angka kemiskinan yaitu mencapai 249 jiwa dikarenakan terdampak Covid-19 dan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan karena di PHK oleh perusahaan atau tempat mereka bekerja sehingga semakin bertambahnya angka pengangguran, lalu pada tahun 2021

¹⁶ Monografi Desa Banjar Negeri 2022

mengalami penurunan sebesar 238 jiwa dan kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Desa Banjar Negeri mencapai 246 jiwa, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sudah termasuk angkatan kerja namun mereka tidak mau bekerja ataupun mencari pekerjaan.

Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengurangi kemiskinan terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 serta pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.¹⁷ Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.

Permasalahan kemiskinan sangat perlu penanganan yang dilakukan secara sungguh-sungguh demi menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi (*lost generation*) dimasa yang akan datang. Upaya dalam mengurangi kemiskinan perlu juga dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui pengembangan dan peningkatan suatu usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial. Dalam mengurangi kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat miskin itu sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM dan PKH), program berbasis

¹⁷ UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara. Ayat (2) Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh Rakyat dan Memberdayakan Masyarakat Yang Lemah dan Tidak Mampu

pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa “perlindungan sosial adalah semua upaya yang di arahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.¹⁸

PKH dilaksanakan oleh UPPKH (Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan) pusat, UPPKH Provinsi, koordinator PKH Kabupaten/Kota dan pendamping PKH. PKH menitikberatkan pada dua komponen besar masalah, yakni bidang Pendidikan dan kesehatan. Perlu disadari bahwa tidak semua orang memperoleh Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan harapan, banyak masyarakat kebawah yang belum mengenyam Pendidikan karena mahalnya biaya Pendidikan di Indonesia. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *centre of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.¹⁹

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan adalah salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena tingkah lakunya yang buruk seperti malas untuk berusaha dan bekerja. Kemiskinan kultural ini membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islampun menanggapi kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya, jika

¹⁸ Aminah Nur Habibah et al., “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 251–58.

¹⁹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial RI, 2017, h. 1.

kemiskinan tersebut semakin merajalela maka ini akan menjadi kemiskinan yang dapat membuat lupa kepada Allah dan juga rasa sosialnya terhadap sesama.

Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan. Dalam Islam sangat jelas bahwa adanya kewajiban pada setiap individu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan yaitu dengan bekerja, selain dari pada kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan terhadap keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Kewajiban pemerintah tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber dana yang sah.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.s Al-Isra' ayat 26-27:

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (Q.S Al-Isra' ayat 26).*

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S Al-Isra' ayat 27).*

Maksud penjelasan dari ayat tersebut adalah Berilah kerabatmu hak-haknya berupa kebaikan dan silaturahmi dan berilah orang yang membutuhkan itu haknya berupa zakat, juga orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, bersedekahlah kepada mereka janganlah kamu menafkahkan harta benda kepada selain

tempat yang disarankan oleh syariat dalam urusan infak yang halal dan infak kepada selain yang berhak.

Dalam Islam sangat jelas adanya bahwa kewajiban setiap individu adalah untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan yaitu dengan bekerja, selain kewajiban individu terdapat juga kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat, dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan terhadap keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Kewajiban pemerintah tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumberdana yang sah. Islam juga mengatur tentang bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Namun diantara ketiganya yang sangat terkait dengan pembahasan ini adalah infaq, dimana infaq merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagaimana Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia sehingga dapat terlepas dari kemiskinan.

Berikut ini adalah jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Desa Banjar Negeri pada tahun 2019-2022.

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Banjar Negeri Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Penerima
1	2019	139
2	2020	143
3	2021	148
4	2022	156

Sumber: Wawancara Dengan Aparatur Desa Banjar Negeri

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima PKH di Desa Banjar Negeri pada tahun 2019 berjumlah 139 KPM

dan selalu bertambah pada setiap tahunnya seperti diketahui pada tahun 2020 berjumlah 143 KPM, pada tahun 2021 berjumlah 148 KPM hingga pada tahun 2022 jumlah penerima PKH di Desa Banjar Negeri mencapai 156 KPM.

Pada tahun 2018 sebagaimana disampaikan dalam salah satu media bahwa penerima PKH di Kabupaten Tanggamus sebanyak 18.444 kepala keluarga (KK) telah menerima bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan total anggaran sebesar Rp9,223 Miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada golongan-golongan yang dianggap berhak menerimanya, penerima bantuan tersebut diantaranya ibu hamil, balita, anak pra sekolah (PAUD, TK), anak SD, siswa/I SMP, siswa/I SMA, Lansia dan penyandang Disabilitas.²⁰

Jumlah penerima PKH pada tahun 2019 tersebar di 20 kecamatan kabupaten Tanggamus, sebanyak 31.531 KPM PKH dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin tersebut. Sebesar Rp 19.205.200.000 jumlah dana yang telah disalurkan pada tahun 2019, di beberapa lokasi yang tersebar di Kabupaten Tanggamus disalurkan dengan sistem non tunai, masyarakat kurang mampu telah mendapatkan bantuan perekonomian dengan adanya program tersebut meskipun tidak secara keseluruhan kebutuhan dapat terpenuhi.²¹

Pada tahun 2020 program ini telah berjalan selama 8 tahun, pemerintah telah memutuskan berbagai kebijakan terkait bantuan sosial untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat serta menjaga pemenuhan kebutuhan pokok diantaranya kebijakan PKH kepada 10 juta KPM, kartu sembako pada 20 juta KPM, kartu Prakerja, pembebasan tarif listrik 450VA, serta diskon tarif listrik 900VA, program pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM, program bantuan sosial tunai (BST) serta BLT Dana Desa untuk masyarakat diluar penerima PKH dan sembako serta berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk PKH seluruh penerima PKH diberikan bantuan sosial beras masing-masing akan menerima 15 kg beras/KPM/bulan

²⁰ <https://www.kupastuntas.co/daerah-lampung/tanggamus/2200>

²¹ <https://tanggamus.go.id/index.php/13-news/218-news108>

sebanyak 34.959 penerima program bantuan PKH dan tersebar di 326 titik di Kabupaten Tanggamus.²²

Menurut Imam petugas operator PKH pada tahun 2021 sebanyak 43.561 KPM PKH di Kabupaten Tanggamus, jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 8.602 KPM dari jumlah total penerima sebelumnya, karena adanya pendataan baru dan peralihan dari bantuan lain sebelumnya. Bantuan tersebut ada untuk tiap bulan disalurkan kepada para penerima yang telah ditentukan sesuai dengan hitungan tahap cairnya, dengan adanya hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.²³

Desa Banjar Negeri merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan jumlah penduduk 2.457 yang terdiri dari 1.133 laki-laki, 1.324 perempuan dengan jumlah keluarga 502 KK. Hingga pada tahun 2022 jumlah penerima PKH di Desa Banjar Negeri sebanyak 156 KPM dengan kategori penerima yaitu: Masyarakat kurang mampu (penghasilan di bawah 1 juta/bulan), Masyarakat yang sudah teregistrasi LDBDT, Ibu hamil, Anak sekolah hingga tingkat SMA dan Lansia. Dari kategori penerima Bantuan Sosial tersebut terdapat ketidaksesuaian antara kategori yang diterapkan di Desa Banjar Negeri dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat penerima PKH yaitu adanya masyarakat penerima PKH di Desa Banjar Negeri dengan penghasilan dibawah 1 juta/bulan, tidak memiliki anak sekolah, tidak hamil, tidak lanjut usia, telah memiliki rumah yang layak dengan tembok yang sudah di plester dan di cat, lantai keramik dan atap genteng dengan kualitas yang baik, namun tetap mendapatkan Bantuan Sosial PKH.

Berdasarkan paparan di atas Penulis tertarik untuk meneliti Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).

²² <https://tanggamus.go.id/index.php/13-news/439-news666>

²³ <https://www.radartanggamus.co.id/2021/07/13/jumlah-penerima-pkh-meningkat-sekitar-5-ribu/>

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas bantuan sosial PKH dalam mengurangi kemiskinan di Desa Banjar Negeri. Adapun Sub Fokus penelitian ini adalah masyarakat miskin penerima bantuan sosial PKH yang ada di Desa Banjar Negeri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus
2. Untuk mengetahui Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

F. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil dari masing-masing penelitian, diharapkan hasil tersebut dapat membawa manfaat bagi pihak lain dan penelitian yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah literatur atau referensi, serta pemahaman ilmu ekonomi islam oleh penulis dan pembaca.
 - b. Dapat digunakan sebagai perbandingan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait topik penelitian yaitu

Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Kemiskinan.

2. manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, pengalaman penelitian dan peningkatan pengetahuan khususnya terkait dengan Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan, harus diselaraskan dengan pengetahuan teoritis universitas.
 - b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pengetahuan, materi informasi dan penelitian ilmiah untuk mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan.
 - c. Bagi Lembaga yang di teliti, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau acuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan disesuaikan dengan perspektif ekonomi islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan. Berikut ini beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dijelaskan oleh peneliti:

1. Aminah Nur Habibah, Ruslan Abdul Ghofur, Erike Anggraeni dan Anas Malik²⁴

Yang membahas tentang “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh salah satu kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Program Keluarga Harapan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan kementerian sosial. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi islam merupakan kegiatan positif dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan yang meliputi kebutuhan Addaruriyah,

²⁴Habibah et al., “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan.”

kebutuhan Al-hajjyah, kebutuhan Al-tahsiniyah dan kebutuhan Al-kamiliyah dengan tidak melanggar aturan dan hukum islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang Efektivitas PKH Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas tentang Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tentunya berbeda dengan yang saat ini peneliti gunakan. Objek dan tempat penelitiannya berbeda sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda juga.

2. Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi²⁵

Yang membahas tentang “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan” pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Nagari Lagan Hilir dengan variabel penelitian kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan efektivitas dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program, penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan belum bisa dikatakan efektif penentuan sasaran belum tepat sasaran.

Perngembangan dari penelitian terdahulu adalah penelitian yang saat ini digunakan membahas dalam Perspektif Ekonomi Islam. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu tentunya berbeda dengan yang saat ini peneliti gunakan. Objek dan tempat penelitiannya juga berbeda.

3. Winda Jayanti dan Rina Novianty²⁶

²⁵ Apando Ekardo, Firdaus Firdaus, and Nilda Elfemi, “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 3, no. 1 (2014): 1–9.

Yang membahas tentang “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Waetuwo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan dari segi Perspektif Ekonomi Islam dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari sistem ekonomi islam yang memiliki prinsip yaitu adanya jaminan sosial serta terwujudnya kesejahteraan (falah), dalam implementasinya PKH hanya sebatas jaminan sosial pemerintah untuk kebutuhan kesehatan dan Pendidikan bagi keluarga miskin, namun untuk memperoleh kesejahteraan (falah) PKH belum bisa di katakan dapat mensejahterakan masyarakat miskin.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti membahas tentang Efektivitas PKH Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas tentang Pengaruh PKH Terhadap Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Objek dan tempat penelitian yang digunakan berbeda sehingga menghasilkan hasil penelitian yang tentunya berbeda juga.

4. Vicy Andriany, Tezi Asmadia dan Eka Kharisma²⁷

Yang membahas tentang “Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Nagari Balimbing”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Nagari Balimbing. Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil pannelitian ini menunjukkan bahwa peran

²⁶ Winda Jayanti And Rina Novianty, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” N.D.

²⁷ Vicy Andriany and M Ec Dev Andriany, “Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Nagari Balimbing,” *Al-Ittfaq: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 1–11.

Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing menunjukkan bahwa PKH secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Nagari Balimbing, yaitu dibuktikan dengan adanya masyarakat yang graduasi mandiri atau KPM yang berakhir kepesertaan KPM PKH, karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang Efektivitas PKH Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas tentang Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. Objek dan tempat penelitian yang digunakan berbeda sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula.

Dari penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya PKH pada setiap wilayah memiliki pengaruh yang berbeda-beda, Begitu pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji efektivitas PKH yang ada di Desa Banjar Negeri serta tinjauannya dalam perspektif Ekonomi Islam, tentu penelitian ini akan menghasilkan output berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau sarana guna memperoleh data penelitian yaitu di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada kenyataan bahwa banyak masyarakat Desa Banjar Negeri yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah khususnya Program Keluarga Harapan, apakah efektif dalam mengurangi kemiskinan dan sudah sesuaikah dengan prinsip ekonomi islam, sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam suatu penelitian, dapat dilihat jenis penelitian berdasarkan sifat, tujuan, bentuk dan penerapannya. Sedangkan dalam jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis

penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian studi lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian dalam kancah sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang objeknya adalah masyarakat khususnya penerima Program Keluarga Harapan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sejumlah karakter yang dapat memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi, wawancara dan partisipasi langsung. Karena penelitian kualitatif adalah instrument dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang ditentukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian dilapangan. Hal demikian dirasa tepat untuk memperoleh hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif hal demikian digunakan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain, cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang sesuatu yang diteliti. Penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksud adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang di kumpulkan atau di sajikan untuk tujuan tertentu. Menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Moleong kata-kata adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak Informan yaitu Aparatur Desa, masyarakat penerima PKH dan ketua PKH di Desa Banjar Negeri yang diperoleh dari hasil wawancara. Informan dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan Teknik *Purposive sampling* dimana pemilihan informan ditentukan secara sengaja dan menggunakan bebarapa orang lain sebagai *key informan*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka, buku, serta jurnal, Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan yang sedang dilakukan. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui catatan-catatan, arsip dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer penelitian ini yaitu tentang efektivitas bantuan sosial PKH dalam upaya mengurangi kemiskinan menurut perspektif ekonomi Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah penelitian ini berbagai macam Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁸ Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Data primer dikumpulkan melalui melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Setelah data dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yang menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran dari suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun kelapangan untuk mengetahui bagaimana efektivitas PKH dalam mengurangi kemiskinan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak. Observasi juga bertujuan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan fakta yang ada. Pengamatan ini bersifat formal dan informal. Dengan menggunakan metode ini dapat memandu peneliti dalam memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya terkait pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai pengamat dan mengamati secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, dan biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab atas pertanyaan tersebut. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak didapatkan melalui observasi, dikarenakan peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipasi. Dengan

²⁸ R Semiawan Conny, "Metode Penelitian Kualitatif," *Jakarta: Grasindo*, 2010.

mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain sehingga dapat mengerti dan mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Karena perasaan, pikiran orang dan persepsi sangat berarti dapat dipahami, dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah. Dalam wawancara bukan hanya mengajukan pertanyaan yang dilakukan peneliti, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain. Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni:

1. wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali;
2. wawancara terarah (*guided interview*) dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁹

Dengan metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat penerima PKH di Desa Banjar Negeri sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara *semi terstruktur* dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, dan masih menggunakan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan ketika wawancara. Peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana responden ditanyakan pendapat dan idenya.

c. Dokumentasi

²⁹ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai informasi, fakta, data dan pengetahuan sehingga dapat mengumpulkan data klasifikasi. Klasifikasi dari bahan tertulis terkait pertanyaan penelitian dari sumber dokumentasi yang diperoleh selama penelitian di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.³¹ Dalam penelitian ini populasinya adalah 156 masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), 4 ketua PKH dan 3 aparatur desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Negeri.

b. Sampel

³⁰ David Hughes and Graham Hitchcock, "Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6," *Unpublished Thesis*, 2008.

³¹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2019.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³² Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu. Oleh karenanya peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak dapat dimintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid dengan kriteria yaitu ketua PKH, rumah tangga penerima manfaat PKH dan dapat memberikan keterangan. Berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu 3 aparatur Desa, 4 ketua PKH dan 13 penerima PKH di Desa Banjar Negeri.

6. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang sudah tersedia dari berbagai macam sumber baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya. Setelah keseluruhan data terkumpul, maka kegiatan selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data adalah menyusun secara sistematis bahan hasil observasi, wawancara, dan menafsirkannya sehingga menghasilkan suatu teori atau gagasan, pemikiran dan pendapat yang baru inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. Dalam analisis kualitatif *finding* berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep, *insights* dan *understanding*. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis secara Deskripsi Kualitatif. Deskripsi merupakan

³² Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

suatu penelitian yang memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan segala sesuatu secara objektif. Sedangkan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang sudah diperoleh secara menyeluruh dari lapangan, baik data yang diperoleh tersebut berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun bahan yang lainnya secara sistematis. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik analisis data dengan tiga Teknik analisis, yaitu:

a. Reduksi data

Dalam tahap ini, data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Data yang direduksi dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber yaitu 20 orang yang terdiri dari masyarakat penerima PKH, ketua PKH dan aparatur desa. Sehingga, peneliti akan mengumpulkan dan menyusun jawaban dari narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dari penelitian ini.

b. Penyajian data

Usai data direduksi selanjutnya masuk ke display data. Dalam tahapan proses ini, peneliti memberikan data hasil reduksi. Data yang disajikan merupakan deskripsi dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber yaitu masyarakat penerima PKH, ketua PKH dan aparatur desa, kemudian penulis dapat menyajikan data dalam bentuk teks naratif dan tabel.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan yaitu pemahaman yang lebih jelas tentang efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Desa Banjar Negeri dapat disimpulkan dalam studi kualitatif ini.

Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami tanpa berbelit-belit.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan pada penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi kualitatif program sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.³³ Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab. Setiap bab diuraikan beberapa subbab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian meliputi teori kemiskinan, efektivitas, Program Keluarga Harapan dan teori ekonomi Islam.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini meliputi tentang gambaran umum objek penelitian dan deskripsi data secara lengkap mengenai data yang diperoleh dilapangan. Meliputi profil desa, keadaan geografis, pemerintahan, dan kondisi masyarakat.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang hasil Analisa data sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Desa Banjar Negeri dan Pespektif Ekonomi Islam mengenai Program Keluarga Harapan.

BAB V PENUTUP

³³ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, hlm 14.

Pada bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan kondisi seperti ini, ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.³⁴

Menurut Suharto salah satu kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya adalah kelompok lemah secara struktural, yaitu baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang malas, lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan adanya diskriminasi dalam aspek-aspek tertentu.

Sennet dan Cabb dan Conway menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial,

³⁴ Yudid B S Tlonaen, Willy Tri Hardiyanto, and Carmia Diahloka, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2015).

ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya kelegangan fisik maupun emosional. Oleh karena itu, faktor dominan yang mempengaruhi ketidakberdayaan selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena ketidakberdayaan dari sudut pandang ekonomi dapat diartikan sebagai kelemahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.³⁵

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan pun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.³⁶ Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Kemiskinan merupakan dampak yang sangat nyata didalam kehidupan masyarakat terutama bagi keluarga sangat miskin baik diukur dari segi kemampuan perekonomian, pendidikan maupun kesehatan berupa pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi yang dapat memicu akan rendahnya sumber daya manusia. Kemiskinan juga merupakan fenomena sosial struktural yang berdampak krusial bagi keberhasilan pembangunan. Amartya Sen mengemukakan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila mereka tidak dapat melakukan sesuatu dan bukan karena mereka tidak mempunyai sesuatu.

Shirazi dan Pramanik berpendapat bahwa kemiskinan diartikan juga sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang, dimana mereka tidak mempunyai cukup sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi, psikologis, sosial, maupun spiritual. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) juga berpendapat bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya

³⁵ Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS), Cetakan kedua, 2012. Hlm: 3-4.

³⁶ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *kamus istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm.185

dalam taraf kehidupan dan juga tidak sanggup memanfaatkan tenaga, mental ataupun fisiknya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

2. Teori Kemiskinan

Terdapat dua teori besar (*Grand Theory*) mengenai kemiskinan, yaitu teori Neo-liberal dan sosial demokrat.

a. Teori Neo-Liberal

Pandangan Neo-Liberal terhadap kemiskinan, landasan teorinya adalah individual, konsepsi dan indikator kemiskinannya adalah kemiskinan absolut. Sedangkan penyebab kemiskinan menurutnya adalah kelemahan dan pilihan-pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, dan lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh). Strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui penyaluran pendapatan kepada orang miskin secara selektif, memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan. Prinsipnya adalah residual dan dukungan yang saling menguntungkan (*mutual aid*).

Dengan kata lain para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat *residual*, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang baru boleh ikut campur manakala Lembaga-lembaga diatas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Penerapan program-program *strutural adjustment*, seperti Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS, di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini. Kaum neo-liberal

memandang bahwa strategi penanganan kemiskinan yang melembaga seperti konsep sosial demokrat merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan.³⁷

Menurut teori neo-liberal kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya, karena Teori Neo-liberal menganggap masalah kemiskinan adalah masalah individu. Strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan pendapatan terhadap orang miskin secara selektif, memberikan pelatihan, keterampilan dan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakatnya dan LSM.

Teori Neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi karya monumental Adam Smith, *the Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *The Road to Serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas *laissez faire*, sebagai ide yang mengunggulkan “mekanisme pasar bebas” yang terkenal dengan lima prinsip dasarnya.³⁸

b. Teori Demokrasi Sosial

Pandangan Sosial Demokrat terhadap kemiskinan landasan teorinya adalah struktural. Konsepsi dan Indikator kemiskinannya adalah kemiskinan relatif. Penyebab kemiskinan, menurutnya, adalah ketimpangan struktur ekonomi dan politik serta ketidakadilan sosial. Strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui penyaluran pendapatan dasar secara universal, perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui

³⁷ Rudy Haryanto, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 1 (2012): 178–200.

³⁸ Teuku May Rudy, “Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi,” *Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, Hlm*, 2007, 149–51.

intervensi negara. Prinsipnya adalah institusional, redistribusi pendapatan vertikal dan horizontal, aksi kolektif. Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum sosial demokrat.

Teori sosial demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economy*) dan majemen ekonomi Keynesian ini, muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi Manajemen-Permintaan” (*demand management economics*) gaya Keynesian ini.³⁹

Teori ini berpijak pada analisis Karl Marx (1818-1883) dan Frederick Engels (1820-1895), sebagai pendukung teori sosial demokrat yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Dalam arti bahwa manusialah ukuran segala hal dan bahwa segala upaya sosial haruslah diukur dengan kriteria apakah itu mengembangkan pribadi manusia atau bukan.⁴⁰

Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai *evil*. Bahkan kapitalis masih

³⁹ Haryanto, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai.”

⁴⁰ Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm.52

dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar, melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*). Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga).

Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori sosial demokrat. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (*choices*). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Pendukung sosial demokrat

meyakini bahwa penanganan kemiskinan yang bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neo-liberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, kaum sosial-demokrat justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Teori Demokrasi Sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu melainkan persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran dan ekonomi manajemen permintaan. Menurut teori demokrasi sosial strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga), seperti program-program jaminan sosial dan bantuan sosial.⁴¹

Konsep kemiskinan teori lama masih berporos pada teori neo-liberal oleh Bank Dunia yang didasari teori-teori modernisasi yang sangat mengagumkan pertumbuhan ekonomi dan produksi, sedangkan kemiskinan paradigma baru memperhatikan kemiskinan struktural dan dimensinya.

Kemiskinan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Analisanya juga bisa beragam begitupun solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Meskipun banyak program pengentasan kemiskinan, namun sampai saat ini masalah kemiskinan belum sepenuhnya bisa diatasi. Memang kemiskinan memiliki permasalahan yang kompleks, dimana

⁴¹ M Subari, “M. Subari Perubahan Paradigma Konsep Penanggulangan Kemiskinan Dalam Prospektif Konsep Pendidikan Islam,” *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 16, no. 2 (2021): 81–90.

akar penyebabnya seperti benang kusut yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga sulit untuk memutus rantainya.⁴²

Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena objek kemiskinan adalah manusia sebagai makhluk sosial maka yang dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.⁴³

Berikut indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebagai berikut:

a. Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

b. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang

⁴² Isnaini Harahap, "Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner," 2019.

⁴³ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Hlm: 97.

disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

c. Persentase penduduk miskin

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

e. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

f. Gini Ratio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

g. Ukuran Bank Dunia

Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut:

Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.⁴⁴

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan diberbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada

⁴⁴ Istiana Hermawati et al., *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan*, 2015.

kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*stage of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena prilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashlahatan itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

⁴⁵ Rulan Ahmadi, Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya), Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hlm. 12

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi Pembuatan Hukum Islam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-balad ayat 16 menjelaskan bahwa miskin adalah: “Yakni sangat miskin sehingga menempel ditanah, lagi tak punya apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dza matrabah artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sesuatu yang dapat menghindarinya dari menempel ditanah. Fakir/al-faqru yang berarti adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan kebaikan, yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang/sedikit makanan yang berarti membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sedang fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dikarenakan oleh sebab khusus yang syar’i (uzur syar’i), seperti usia tua dan sakit-sakitan.⁴⁶ Tetapi dalam Islam kemiskinan tidak boleh menjadi penghambat seseorang melakukan kebaikan. Justru Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk juga mau berinfak meski dalam jumlah yang sedikit, jangan sampai orang tidak pernah berbagi semasa hidupnya dengan alasan kemiskinan.

Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah SWT. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan

⁴⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syari’ah, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 72

makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S Al-Mulk ayat 15)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa: “Berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki diberbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk mencari mata pencaharian dan perniagaan (mencar rizki).

Pemenuhan kebutuhan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs. Thaha ayat 14 sebagai berikut:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: “*Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku*”. (Q.S Thaha ayat 14)

Dalam tafsir Ibnu Katsir suarat Thaha ayat 14 menjelaskan bahwa: “ini merupakan kewajiban pertama bagi orang mukalaf, yaitu hendaknya ia mengetahui bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan sholatlah untuk mengingat Allah.

Pada kedua surat diatas dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia dimuka bumi yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan dan juga pemenuhan kebutuhan spiritual seperti yang dijelaskan pada ayat kedua Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya mendirikan shalat. Disebutkan ruku’ dan sujud karena keutamaan keduanya dan karena ia merupakan rukun shalat. serta keberuntungan terkait dengan beberapa perkara seperti shalat, ibadah dengan ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain, seperti berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Arti *falaah* (keberuntungan) adalah tercapainya apa yang diharapkan dan selamat dari marabahaya, termasuk diantaranya adalah masuk ke dalam surga.

Terdapat beberapa ayat Al-qur’an yang berbicara tentang tentang jaminan sosial yang menyuruh kaum muslimin untuk saling tolong-menolong saudara mereka yang fakir dan miskin

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 7 dibawah ini

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “harta rampasan (fa’i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”. (Q.S Al-Hasyr ayat 7)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa negara Islam, dalam kedudukannya sebagai wali bagi orang-orang miskin dan mereka yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Di dalam penerimaan negara yang berasal dari fai’, Al-Qur’an dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin, selain menetapkan negara Islam bertanggung jawab untuk mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, sahabat dan tetangga mereka yang membutuhkan bantuan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif, menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi, menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi yaitu:

1. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan)
2. Sumber keuangan (pekerjaan, kredit)
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan Bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial)
4. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa
5. Pengetahuan dan keterampilan
6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Kemiskinan juga memiliki berbagai dimensi diantaranya yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

3. Bentuk dan jenis kemiskinan

Masalah mengenai kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan itu tidak hanya membahas akan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan kondisi, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat

disebabkan adanya tuntutan tradisi yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta adat lainnya, termasuk juga dalam hal ini adalah sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke masa depan.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat mengakses sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Kemiskinan ini terjadi karena kelembagaan, tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang telah terstruktur dengan piramida sosial yang menempatkan adanya pembagian kelas dalam masyarakat yaitu kelas atas (*high class*), kelas menengah (*middle class*), dan kelas bawah dan paling bawah (*lower and lower-lower class*).

Setelah mengenal empat bentuk kemiskinan diatas, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya, yaitu:

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan atau sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan dan seringkali

dikaitkan dengan konsep pembangunan di negara-negara berkembang.

4. Faktor-faktor timbulnya kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, yaitu:

- a. Tingkat Pendidikan yang rendah
Dengan tingkat Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya.
- b. Malas bekerja
Adanya sikap malas atau pasif yaitu bersandar pada nasib menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak memiliki keinginan untuk bekerja.
- c. Keterbatasan sumber alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
- d. Terbatasnya lapangan kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara factual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
- e. Keterbatasan modal
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
- f. Beban keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan, karena semakin

banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. *Ketiga* kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.⁴⁷

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas sumberdaya alam masih rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil. Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan *vicious circle* (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan.

5. Dampak dari kemiskinan

Adapun beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Unit Penerbit Dan Percetakan PN, 1997).

a. Kriminalitas

Kriminalitas yang terjadi disekitar kita bisa disebabkan oleh kondisi kemiskinan. Hal itu dilakukan karena mereka kesulitan mencari nafkah sehingga mereka akan lupa diri untuk memnuhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka biasanya akan melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencopet, jambret, mencuri, perampokan dan segala tindakan kriminalitas lainnya.

b. Pengangguran

Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya.

c. Tidak ada/kurangnya Pendidikan

Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah ketrampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing secara global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

d. Tingkat kematian yang tinggi

Hal ini terjadi karena kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatan. Belum lagi biaya pengobatann yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin.

e. Konflik sosial

Konflik sosial bernuansa SARA muncul sebagai akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Konflik sosial ini terjadi karena masyarakat miskin merasa tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.

6. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

- a. Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK.
- b. Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.
- c. Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.
- d. Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

7. Strategi penanggulangan kemiskinan

a. Memperbaiki program perlindungan sosial

Sistem perlindungan sosial bertujuan untuk membantu individu ataupun masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi didalam kehidupan, misalnya kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana, jatuh sakit dan lainnya.

b. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar

Bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin adalah meningkatnya akses dibidang kesehatan, Pendidikan, sanitasi, air bersih, serta pangan dan gizi yang

dapat membantu dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat miskin.

c. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin

Pemberdayaan kelompok adalah upaya yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat miskin.

d. Menciptakan pembangunan yang inklusif

Pembangunan yang inklusif ditujukan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.⁴⁸

8. Program pengentasan kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) yang saat ini ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupa bantuan tunai maupun non tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.⁴⁹

Masalah kemiskinan adalah permasalahan yang mengglobal. Menurut martin dan sehuman, kemiskinan ditingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya

⁴⁸ Muin and Rosdiana, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar."

⁴⁹ TNP2K, Program Penanggulangan Kemiskinan, tersedia di: <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/>

yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan 80% dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relative miskin strategi dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan pemberdayaan. Masyarakat yang sangat miskin, misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan. Kemiskinan sejak zaman dahulu hingga sekarang belum bisa terpecahkan secara tuntas, kemiskinan juga tidak sekedar masalah negara-negara miskin saja kemiskinan menyangkut negara kaya akan sumber daya alam.⁵⁰

Kemiskinan juga masih ditemukan dalam negara-negara maju, Kemiskinan memang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Secara umum masyarakat miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu golongan miskin sekali (fakir miskin), miskin dan hampir miskin (rentan terjadi miskin). Untuk masyarakat golongan fakir miskin pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti bantuan raskin, bantuan tunai langsung, beasiswa, jamkesmas, dan sebagainya. Dalam realisasinya, bantuan tersebut ternyata tidak mudah masyarakat lebih suka mengaku sebagai fakir miskin dengan harapan mendapat berbagai bantuan gratisan tersebut, akibatnya sifat ketergantungan semakin meningkat.⁵¹

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun memandangnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengatasi kemiskinan digunakan dan diterapkan sistem

⁵⁰ Heri Risal Bungkaes, J H Posumah, and Burhanuddin Kiyai, "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud," *Acta Diurna Komunikasi* 2, no. 2 (2013).

⁵¹ Bungkaes, Posumah, and Kiyai.

ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut: Berusaha dan bekerja, Larangan menumpuk harta, Zakat, Hukum waris, Ghanimah dan Hemat. Namun seiring berkembangnya zaman tentu dari keenam poin yang masih relevan untuk diterapkan hanya 5 poin karena saat ini konsep ghanimah sudah tidak ada lagi.⁵²

Islam mengajarkan bahwa manusia yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakikatnya hanya sebatas menerima dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Maka sebagai konsekuensinya ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta sedekah dan infak. Allah menjadikan harta sebagai alat dan sarana kehidupan seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan mereka bersama. Pemberian zakat, sedekah dan infak yang diajarkan Islam mengarahkan pada nilai solidaritas dan persaudaraan terhadap sesama.⁵³

Umat Islam Indonesia yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan memahami bahwa kemiskinan yang mereka derita adalah takdir (ketetapan yang tidak bisa diubah) dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah telah menentukan hidupnya miskin, jadi segigih apapun mereka berusaha, hasilnya tetap miskin. Kerjapun akhirnya dipahami hanya untuk memenuhi dan menyambung hidup, dan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ironisnya ada pula yang tidak mau bekerja, karena dianggap sia-sia dan bagi mereka seberapa besar rizki itu telah ditentukan Allah dan manusia hanya menunggu saja.⁵⁴

Islam mengatur sedemikian rupa menyangkut masalah kemiskinan umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, diantaranya adalah kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian dan kebakhilan

⁵² Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 25

⁵³ Yuliyani, *Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*, (Iqtishadia: Vol. 8, No. 1, Maret 2015), h. 152

⁵⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), h. 126

orang kaya yang menyebabkan orang miskin semakin terjerat dari lingkaran kemiskinannya. Mengenai akan faktor kemiskinan di atas, tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah harta yang dimiliki oleh setiap orang, dimana dari harta yang dimiliki digunakan memenuhi kebahagiaan dalam kehidupannya dan agar bisa terlepas dari yang namanya kemiskinan.⁵⁵

Kemudian dalam Islam ada yang bisa juga dilakukan yaitu mengenai strategi pengentasan kemiskinan. Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja, yaitu:

a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*)

Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*).

Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Didalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap

⁵⁵ Yuliyani, Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah terhadap Isu Kemiskinan, (Iqtishadia: Vol. 8, No. 1, Maret 2015), h. 152

kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan beasiswa bagi yang belajar agama

- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*).

Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.

- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*).

Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan dan kesehatan.

- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*).

Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf.⁵⁶

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

- a. Kewajiban setiap individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga diperintahkan agar berkelana dibumi Allah SWT serta makan dari rezeki-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

⁵⁶ Sri Budi Cantika Yuli, Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam (Jurnal Ekonomika-Bisnis: Vol. 4 No. 2 Juli 2013), h. 108-109

Artinya: *“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”*. (Q.S Al-jumu’ah ayat 10)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jumu’ah ayat 10 menjelaskan bahwa: “setelah mereka dilarang untuk bertransaksi sesudah seruan yang memerintahkan mereka berkumpul (sholat), kemudian diizinkanlah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah.

Pada surat Al-jumu’ah ayat 10 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa adanya kewajiban individu untuk bekerja/mencari nafkah. Hal ini merupakan salah satu cara utama dalam mengentaskan kemiskinan, ia adalah sarana utama dalam memperoleh kekayaan serta faktor dominan dalam memakmurkan dunia.

b. Kewajiban Kelompok/Masyarakat

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Islam juga tidak bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti ialah zakat. Berikut firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”*. (Q.S Al-Baqarah ayat 215)

Pada surat Al-Baqarah ayat 215 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa zakat yang diberikan adalah salah satu cara untuk saling menjamin dan mencukupi hidup baik antar kerabat dekat, anak yatim maupun sesama kaum muslim yang memerlukan pertolongan.

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma Islam Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa. (Q.S Al-Hadid ayat 25)*

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa: “maksud keadilan pada ayat ini menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya mengtakan bahwa keadilan itu ialah perkara hak yang diakui oleh rasio yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sakit lagi tidak benar”.

Pada surat Al-Hadid ayat 25 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemimpin yang memangku amanah untuk mensejahterakan negara yang ia pimpin, termasuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Komitmen Islam

yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

Akan tetapi, dalam Islam harta bukanlah suatu tujuan hidup. Bukan suatu sebab untuk mencapai kebahagiaan. Kalau seseorang menempatkan harta sebagai tujuan hidup dan menganggap segala-galanya, maka ia akan sering mendapatkan kesulitan daripada kedamaian hati. Tujuan hidup adalah melaksanakan suatu kewajiban-kewajiban. Adapun harta benda yang kita miliki merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu. Kita beribadah perlu harta. Orang tak akan bisa membangun masjid, menyantuni yatim piatu, berzakat dan bersedekah dan berangkat haji tanpa didukung oleh sarana harta benda.⁵⁷

9. Indikator pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam

Ada tiga indikator pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu:

a. Rekonstruksi teologi kemiskinan

Rekonstruksi teologi yang dimaksud adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-mata disebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis miskin itu sendiri, yaitu diam atau tidak bergerak. Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri.

b. Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan

⁵⁷ Isnaini Harahap, Marliyah dan Bambang Irawan, *Islam dan Isu Keuangan Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, November 2015), h. 154

cara berusaha dan bekerja. Fenomena tersebut menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya.

Pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal atau individu dalam upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang tidak kalah penting.

Kedua, peran pemerintahan. Aspek pemerintahan bukan merupakan sarana utama. Namun demikian, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Indonesia sebagai negara penganut konsep *welfare state* (negara sejahtera) seharusnya sudah mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, namun dalam realitanya hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. Membangun etos kerja individu

Tawaran yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam etos kerja terkandung “*spirit*” atau semangat untuk mengubah sesuatu jauh lebih baik. Dengan etos kerja pula, kemiskinan dapat diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.⁵⁸

⁵⁸ Syaiful Ilmi, Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, (Jurnal Ilmu Syari'ah: Vol. 13 No. 1, April 2017), h. 76-82

B. Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.⁵⁹

Menurut Richard Steer, efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya semakin efektif organisasi tersebut.⁶⁰ Terdapat beberapa pendapat dalam menerjemahkan pengertian efektivitas, dimana perbedaan pendapat ini karena perbedaan kerangka yang dipakai. Menurut Richard M. Steers yang mengemukakan bahwa efektivitas dapat dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan organisasi yang layak dicapai. Untuk mengetahui efektivitas dari suatu kegiatan dapat menggunakan teori lima tepat yang dikemukakan oleh Matland dalam bukunya Nugroho yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.⁶¹

Kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan.⁶² Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan

⁵⁹ Ahmad Wito Subagyo, "Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan:: Studi Kasus Di Kabupaten Kediri Jawa Timur" (Universitas Gadjah Mada, 2000).

⁶⁰ Badrudin, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm: 21.

⁶¹ Eri Hariyanto, Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Cetakan I, (Yogyakarta: Penerbit Gay Media, 2017).Hlm: 64-65.

⁶² Yasin and Hapsoyo, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru."

sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.

Efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-target yang ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif dari sisi hasil, jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Kondisi ideal yang dimaksud pada program PKH adalah KPM bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarganya.⁶³

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Suharto terdiri dari 4 kriteria yaitu Sasaran, Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah bantuan. Siagian juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu kejelasan tujuan, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap, perencanaan, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien dan yang terakhir yaitu sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Ripley juga mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai faktor yang mempengaruhi kriteria efektivitas yaitu akses,

⁶³ Norsanti Norsanti and Wiwin Safitri, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan," *AS-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2019): 1–7.

cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program.⁶⁴

2. Ukuran efektivitas PKH

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM.

a. Indikator Efektivitas

Untuk dapat mengukur tingkat efektivitas PKH peneliti menggunakan teori efektivitas program menurut Edy Sutrisno yang terdiri dari beberapa Indikator antara lain sebagai berikut:

1. Indikator pemahaman program

Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan. Pemahaman program terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi. Pendamping PKH melakukan kegiatan sosialisasi maupun pertemuan dengan masyarakat penerima PKH rutin sebulan sekali. Hal ini dilakukan dengan cara pembentukan beberapa kelompok berdasarkan wilayah dan ditunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompok agar memudahkan pendamping dalam koordinasi. Indikator pemahaman program ini tidak hanya mencakup sosialisasi program, akan tetapi dalam kegiatan pemahaman program terdapat diskusi mau pun sharing antara pendamping PKH dengan penerima bantuan PKH. Hal ini akan memudahkan

⁶⁴ Nurul Najidah and Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 2 (2019): 69–87.

masyarakat penerima bantuan untuk berkomunikasi dengan pendamping PKH.

2. Indikator tepat sasaran

Teori yang dikemukakan oleh Budiani menyatakan bahwa ketepatan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara umum, sasaran memiliki pengertian yaitu, segala sesuatu yang dicapai dan dihasilkan oleh instansi atau pihak tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan kegiatan/program, karena memberikan ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah peserta PKH yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PKH.

3. Indikator tepat waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan sosial yang diberikan setiap tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta PKH. Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing stakeholders harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam pencairan bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan dapat tersalurkan tepat waktu.

4. Indikator tercapainya tujuan

Tujuan program dapat dilihat dari sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tercapainya suatu tujuan, dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara input dan output yang dihasilkan.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup Keluarga Miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Indikator tercapainya tujuan ini juga dapat dilihat dari kinerja implementor dari Program Keluarga Harapan. Hal ini dikarenakan implementor PKH khususnya pendamping PKH sangat menentukan ketercapaian tujuan dari Program Keluarga Harapan. Pendamping PKH dituntut untuk terbuka dan tidak mengambil hak dari peserta PKH. Pendamping PKH juga memiliki tugas untuk membuat sebuah laporan dimana isi dari laporan tersebut salah satunya merupakan hasil dari PKH sudah terlaksana sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Laporan pertanggung jawaban dari pelaksana merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menilai indikator ini efektif atau tidak. Selama pelaksanaan PKH, para pelaksana program mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap perjalanan pelaksanaan PKH. Masing-masing pelaksana pada tiap level mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawabannya. Setiap pendamping mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada UPPKH Kabupaten. Sedangkan UPPKH Kabupaten mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada UPPKH Pusat.

5. Indikator perubahan nyata

Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dijalankan. Perubahan nyata dapat berdampak positif, maupun berdampak negatif, tergantung dari proses pelaksanaan

yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Danim bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).⁶⁵

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka

⁶⁵ H Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Prenada Media, 2019).

kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.⁶⁶

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.⁶⁷

Misi dari Program Keluarga Harapan yaitu mengupayakan adanya perubahan pola pikir dan perilaku bagi penerima manfaat untuk kesehatan anak dan ibu hamil serta untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak masyarakat sangat miskin. Suatu kebijakan dan misi yang baik terkadang tidak selaras dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan yang ingin dicapai, terkadang juga secara struktural dapat memiskinkan masyarakat. Hal itu bisa terjadi apabila tidak tepatnya sasaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misal adanya masyarakat miskin yang terkadang menggunakan bantuan tunai yang diterima dipergunakan untuk konsumsi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bukan untuk pendidikan dan kesehatan. Adapun tolak ukur dari sasaran penerima PKH yaitu masyarakat miskin yang rentan terdaftar didalam data terpadu

⁶⁶ Panduan Umum TNP2K, "Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera" (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017).

⁶⁷ Syahputra Adisanjaya Suleman and Risna Resnawaty, "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 88-92.

program penanganan kemiskinan, memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *centre of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.⁶⁸

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang relatif kurang mendukung peningkatan taraf kesejahteraan.

Tujuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meliputi:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM
- b. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
- c. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas kesehatan.
- d. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.⁶⁹

⁶⁸ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial RI, 2017, h. 1.

⁶⁹ Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Pasal 2 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

3. Hak-Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar mendapatkan bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan sebagai protokol pelayanan kesehatan seperti dibawah ini:

Anak usia 0-6 tahun:

- 1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- 2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan februari dan agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara ruti setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila dilokasi posyandu terdekat terdapat sekolah PAUD.

Ibu hamil dan ibu nifas:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan difasilitas kesehatan sebanyak 4 kali, yaitu sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- 2) Ibu melahirkan harus harus ditolong oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.

- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu 1, 4 dan 6.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berkaitan dengan Pendidikan yakni kehadiran disatuan Pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti dibawah ini:

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan Pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan Pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB atau SMP/MTs Terbuka).
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut kesatuan Pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau Pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut diatas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM terdekat).
- 5) Apabila anak tersebut bekerja atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa dijalan dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan

ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Anak.

- c. Lansia 70 tahun keatas
 - 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 - 2) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*).
- d. Penyandang disabilitas berat
 - 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
 - 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).⁷⁰

Bila persyaratan kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota. Hak-hak anggota PKH adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b. Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- d. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan seperti dibawah ini:

- a. Bantuan ibu hamil/menyusui Rp. 1.200.000
- b. Bantuan anak usia dibawah 6 tahun Rp. 1.200.000
- c. Bantuan peserta pendidikan setara SD/ Sederajat Rp. 450.000
- d. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat Rp. 750.000

⁷⁰ Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menurut pasal 3.

- e. Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat Rp. 1.000.000
- f. Bantuan penyandang disabilitas berat Rp. 3.100.000
- g. Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp. 1.900.000

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–Juni– September–November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.⁷¹

Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) pengurus peserta PKH pada Lembaga Pembayaran dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
- b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
- c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
- d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

⁷¹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bnatuann Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH.

D. Program Keluarga Harapan menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami dengan mendasarkan segala aspek ontology, epistemologi dan aksiologinya kepada agama islam. Dengan demikian sumber hukum agama islam adalah al-Qur'an dan sunnah, sedangkan hal-hal yang tidak secara jelas di atur dalam kedua sumber ajara islam tersebut di peroleh ketentuannya dengan jalan ijtihad.

Secara epistemologis, ekonomi islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu yang pertama ekonomi islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum Syariah islam yang berkaitan dengan urusan harta (*al-mal*) yang mencakup kepemilikan (*al-milkiyah*), pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyah*), dan distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nas*). Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai (*value-bond*) atau valuational, karena di peroleh dari sumber nilai islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, ekonomi islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa, yang mencakup segala macam cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan pemikiran universal, karena di peroleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi (*istiqrā'*) terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum. Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari aal-Qur'an dan as-Sunnah, tapi cukup di syartakan tidak boleh bertentangan dengan al-Quar'an dan as-Sunnah.

1. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, yang menjadi

landasan paradigma ekonomi islam. Nilai-nilai dasar ini baik filosofis, instrumental maupun institusional di dasarkan atas al-Qur'an dan sunnah yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional, yaitu di tempatkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama bagi ilmu ekonomi.

Menurut M. Umar Chapra nilai-nilai dasar yang harus digunakan dalam membentuk ekonomi islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Menurut Muhammad Abduh, tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap bagi-Nya, sifat-sifat yang *jaiz* disifatkan kepada-Nya dan tentang sifat-sifat yang wajib di tiadakan (mustahil) dari-Nya. Juga membahas tentang para rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib pada diri-Nya, hal-hal yang *jaiz* dihubungkan (dinisbatkan) pada diri mereka dan hal-hal yang terlarang (mustahil) menghubungkannya kepada diri mereka.⁷²

Batu fondasi keimanan Islam adalah tauhid, dimana pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Tauhid mengandung pengertian bahwa alam semesta di desain dan di ciptakan secara sengaja oleh Allah yang maha kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi karena suatu kebetulan. Segala sesuatu yang diciptakan-Nya pasti memiliki tujuan, tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikasi bagi eksistensi jagad raya, dimana manusia merupakan salah satu bagiannya. Sesudah menciptakan jagad raya ini Allah tetap terlibat dalam segala urusannya dan senantiasa waspada dan mengawasi kejadian yang paling kecil sekalipun. Lapangan ekonomi tidak terlepas dari perhatian dan pengaturan islam,

⁷² Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar, "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam," *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34-44.

islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Tujuan usaha dalam islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas.⁷³

b. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah misi utama ajaran islam, karenanya ia akan menjadi salah satu nilai dasar dalam perekonomian. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah Rasul tetapi berdasarkan juga pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Dalam sistem ekonomi islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara maupun sebaliknya semua individu di letakkan pada tingkat ekonomi yang sama, tetapi kondisi tersebut diperbaiki agar setiap individu tidak mengganggu individu yang lainnya dan dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik.⁷⁴ Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Nilai keadilan ini membawa beberapa implikasi, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok

Pemenuhan kebutuhan pokok ini dilakukan dalam kerangka kehidupan yang sederhana yang sesuai dengan anjuran agama islam. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa hukumnya wajib (*fardhi kifayah*) bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat miskin.

⁷³ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49.

⁷⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Prenada Media, 2017).

2. Sumber-sumber pendapatan yang terhormat

Penghasilan masyarakat harus berasal dari sumber-sumber yang terhormat yaitu halal lagi baik (*halalan thayyiban*), sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah.

3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan pasti akan terjadi, karenanya ia merupakan sesuatu yang alamiah. Meskipun demikian kesenjangan ini harus dikurangi dan sumber daya ekonomi harus didistribusikan secara lebih merata. Melebarnya kesenjangan akan merusak nilai-nilai persaudaraan, dan akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

4. Pertumbuhan dan stabilitas

Umat Islam tidak mungkin dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja yang terhormat dan memadai, serta mendistribusikan kekayaan secara lebih merata jika tanpa memiliki tingkat pertumbuhan dan stabilitas perekonomian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ini harus dilakukan secara sehat dan kokoh.⁷⁵

c. Prinsip kenabian (*nubuwwah*)

Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah sebagai pembawa ajaran kebenaran di dunia ini, Rasulullah tidak hanya membawa ajaran tentang persoalan iman dan ibadah *makhdah* semata, tetapi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang universal mencakup seluruh aktivitas manusia baik dari segi keimanan, ibadah, sosial, politik, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya.⁷⁶ Prinsip *An-Nubuwwah* adalah prinsip ekonomi islam yang di dasarkan pada sifat nabi yang empat, yaitu:

⁷⁵ Rizal Fahlefi, "Konsep Dasar Ekonomi Islam," 2021.

⁷⁶ A H Syari, "Prinsip-Prinsip Dalam Bisnis," *Manajemen Bisnis Syariah*, 2022, 11.

1. *Siddiq* (jujur)
2. *Amanah* (terpercaya)
3. *Tabligh* (menyampaikan)
4. *Fathanah* (cerdik atau pandai).

d. Prinsip *khalifah*

Manusia adalah *khalifah* atau wakil Allah di bumi. Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual dan materil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misi secara efektif. Konsepsi tauhid dan khilafah secara *inhern* bertentangan dengan konsep “dosa asal” atau “tabula rasa”, sebab manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam batas-batas yang telah ditentukan-Nya. Manusia diberi kedudukan terhormat untuk menjalankan misi-misi yang digariskan-Nya, dimana nanti akan terdapat pertanggungjawaban dihari kiamat.⁷⁷ Konsep khilafah ini membawa beberapa implikasi, antara lain:

1. Persaudaraan Universal

Khilafah mengandung konsekuensi persatuan dan persaudaraan fundamental umat manusia. Setiap orang adalah khalifah, sehingga seluruh manusia memiliki martabat yang sama. Perbedaan martabat antara satu orang dengan orang lain tidak terletak pada ras, kelompok atau bangsanya melainkan pada pokok keimanannya.

2. Sumber daya adalah amanah

Seluruh sumber daya alam adalah milik Allah, bukan milik manusia. Manusia hanya dititipi untuk memanfaatkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya. Konsepsi ini akan membawa implikasi yang mendasar terhadap konsep kepemilikan sumber daya, antara lain sumber daya harus digunakan untuk kepentingan semua orang, bukan segelintir saja, setiap orang harus mencari sumber daya dengan jujur dan benar,

⁷⁷ Fahlefi, “Konsep Dasar Ekonomi Islam.”

dengan cara yang telah ditetapkan-Nya, meskipun sumber daya telah diperoleh dengan cara benar dan jujur, tetapi tetap harus dimanfaatkan sesuai dengan keamanatannya dan tidak seorangpun berhak menyalahgunakan atau menghancurkan sumber daya.

3. Gaya hidup sederhana

Gaya hidup berlebihan akan menimbulkan sikap berlebihan dan pemborosan sumber daya alam, serta berbagai permasalahan buruk lainnya. Sikap berlebihan juga akan memperlemah ikatan persaudaraan yang merupakan salah satu karakter utama sebuah masyarakat muslim.

4. Kebebasan manusia

Manusia adalah khalifah Allah, karenanya ia harus menghambakan dirinya kepada Allah. Tidak satu orang pun yang berhak membatasi kebebasan manusia, kecuali syari'at islam yang merupakan perintah Allah.

e. Prinsip *Al-Falah* (Hasil)

Al-falah adalah konsep tentang sukses dalam islam. Dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, dalam kacamata islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor lainnya), dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.⁷⁸

2. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam hadir membawa pencerahan dan terus digali untuk diterapkan sebagai sistem perekonomian. Ekonomi islam memiliki solusi terhadap berbagai kelemahan yang

⁷⁸ Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial."

dimiliki oleh sistem kapitalis dan sosialis. Karena islam menghargai kebebasan individu sekaligus menjunjung tinggi kepentingan sosial.

Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

a. Kebebasan individu

individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam, karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, meskipun demikian Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar

Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi antara orang perorang tetapi tidak membiarkannya bertambah luas. Islam menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

d. Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Disamping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan aktifitas ekonomi.

e. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.

f. Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

g. Larangan penumpukan kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan tersebut terjadi

h. Larangan terhadap organisasi anti sosial

Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat, seperti judi, riba, dan sebagainya

i. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan masyarakat, yang saling melengkapi bukan saling bertentangan.⁷⁹

Dalam mengorganisir sistem ekonomi ini, Islam memiliki tiga strategi, yaitu:

- a. Tujuan yang terperinci dan jelas.
- b. Sikap moral dan pola tingkah laku yang dirumuskan dengan baik dari pelaku-pelaku ekonomi.
- c. Undang-undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh negara.

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidak mampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, Pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan

⁷⁹ Fahlefi, "Konsep Dasar Ekonomi Islam."

kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzoliman dan arogansi.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Banjar Negeri

1. Sejarah singkat Desa Banjar Negeri

Desa Banjar Negeri merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yang sudah berdiri sejak tahun 1880. Desa Banjar Negeri berawal dari tanah hutan konservasi (pemeliharaan) oleh para tokoh adat suku Lampung terdahulu, berdirinya Desa Banjar Negeri tidak dapat di pisahkan dengan sejarah geneologis masyarakat Desa Banjar Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dan survey kepada tokoh adat dan masyarakat berdirinya Desa Banjar Negeri berdasarkan struktur masyarakatnya sangat ditentukan oleh struktur kekerabatan. Dalam arti struktur masyarakat berorientasi pada struktur geneologis, berdirinya Desa Banjar Negeri tidak dapat terlepas dari sebuah kekerabatan besar yang berkembang secara turun temurun sejak zaman dahulu. Secara Adat Desa Banjar Negeri di tetapkan sebagai wilayah pendamping Daerah Kesultanan atau Kemandakan Unggak Pekhtiwi.⁸⁰

2. Keadaan Geografis Desa Banjar Negeri

Dalam penelitian ini akan di sajikan keadaan geografis yang merupakan gambaran mengenai batas-batas wilayah, luas wilayah, letak administratif dan keadaan iklim.

a. Batas wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Kejadian
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Sukaraja
3. Sebelah timur berbatasan dengan pekon Kubulangka
4. Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Gedung.

⁸⁰ Tokoh Adat, wawancara pada 15 Februari 2023, pukul 11.28

b. Luas wilayah

Wilayah Desa Banjar Negeri adalah dataran tinggi dengan luas wilayah seluruhnya yaitu 68 km² yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penduduk. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dapat dilihat [ada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Luas penggunaan lahan di Desa Banjar Negeri
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun
2022 (ha)

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Luas tanah sawah	23 ha
2	Luas tanah kering	157 ha
3	Luas tanah basah	0
4	Luas tanah perkebunan	2.652 ha
5	Luas tanah umum	24 ha
6	Luas tanah hutan	2.419 ha
	Total luas	5.275 ha

Sumber: Profil Desa Banjar Negeri Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 3.1 di atas bahwa sebagian besar lahan di wilayah Desa Banjar Negeri digunakan sebagai perkebunan karena mayoritas penduduk di Desa ini berprofesi sebagai petani dikarenakan letak wilayah desa ini jauh dari perindustrian.

c. Letak administratif

Berikut merupakan letak administratif Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan 9km
2. Jarak dari ibu kota ke kabupaten/kota 75km.

d. Keadaan iklim

Iklim Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak adalah sebagai berikut:

1. Ketinggian tempat 89 M
2. Jumlah bulan hujan 6 bulan
3. Suhu rata-rata harian 25-30°C
4. Curah hujan 200-2013 mm/tahun.

B. Keadaan Demografis Desa Banjar Negeri

1. Jumlah penduduk Desa Banjar Negeri

Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2022. Penduduk di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk di Desa Banjar Negeri Kecamatan
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus
Tahun 2022 (ribu jiwa)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (ribu jiwa)
1	Laki-laki	1.133
2	Perempuan	1.324
	Total	2.457

Sumber: dokumentasi Desa Banjar Negeri tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Banjar Negeri pada tahun 2022 berjumlah 2.457 jiwa. Jumlah perempuan 1.324 jiwa, jumlah tersebut lebih tinggi di bandingkan jumlah laki-laki yang sebanyak 1.133 jiwa.

2. Kondisi Pendidikan masyarakat Desa Banjar Negeri

Tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Banjar Negeri sangat berbeda-beda, dapat dilihat dari jenjang Pendidikan yang telah di tempuh. Mayoritas masyarakat Desa Banjar Negeri adalah lulusan SD/ sederajat selebihnya adalah lulusan SLTP, SLTA, dan relative sedikit masyarakat yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi.

Tabel 3.3
Data Penduduk Desa Banjar Negeri Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	35
1	PAUD	115
2	Tamat SD/Sederajat	289
3	SLTP/Sederajat	405
4	SLTA/Sederajat	95
5	D-1	2
6	D-2	6
7	D-3	5
8	S-1	16
9	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	191
10	Usia 7-45 tahun pernah sekolah tapi tidak tamat	399
	Jumlah Total	1.558

Sumber: Monografi Pekon Banjar Negeri Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.3 di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Banjar Negeri belum sepenuhnya mengenyam Pendidikan, namun hingga saat ini banyak masyarakat yang mulai menyadari betapa pentingnya Pendidikan terbukti dalam kehidupan sehari-hari banyak orangtua yang mendukung program pemerintah dalam bidang Pendidikan dengan menyekolahkan anak-anaknya guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara hingga ke jenjang perguruan tinggi.

3. Mata pencaharian masyarakat Desa Banjar Negeri

Mengingat wilayah Desa Banjar Negeri yang keadaan tanah datar dan berbukit-bukit menjadikan masyarakat Desa Banjar Negeri memiliki berbagai macam pekerjaan seperti

petani, pedagang, pegawai negeri sipil, dan lainnya. Berikut di jelaskan mata pencaharian masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banjar Negeri
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	443	155
2	Buruh	109	77
3	Pegawai Negeri Sipil	1	0
4	Montir	9	0
5	Bidan Swasta	0	1
6	Guru Swasta	25	27
7	Tukang Kayu	15	0
8	Wiraswasta	139	96
9	Belum Bekerja	391	648
10	Ibu Rumah Tangga	0	321
	Jumlah Total	2.457	

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri 2022

Berdasarkan tabel 3.4 di atas bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Banjar Negeri adalah sebagai petani. Dan dapat di pahami bahwa kondisi perekonomian masyarakatnya termasuk dalam ekonomi sedang atau cukup.

4. Suku di Desa Banjar Negeri

Berikut data penduduk Desa Banjar Negeri berdasarkan suku.

Tabel 3.5
Jumlah Suku di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh
Balak Kabupaten Tanggamus (jiwa)

No	Etnis	Jumlah (jiwa)
1	Minang	21
2	Sunda	976
3	Jawa	940
4	Lampung	520
	Jumlah Total	2.457

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa suku yang bertempat tinggal di Desa Banjar Negeri mayoritas pendatang dan suku pribumi hanya berjumlah 520 jiwa.

5. Agama

Mayoritas masyarakat Desa Banjar Negeri adalah menganut Agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Banjar Negeri memiliki kegiatan rutin keagamaan seperti pengajian ibu-ibu pada setiap hari jumat, ikatan Remaja Islam Masjid (RISMA) dan terdapat organisasi keagamaan lainnya.

6. Sarana peribadatan dan Pendidikan di Desa Banjar Negeri

1. Sarana peribadatan di Desa Banjar Negeri

Tabel 3.6
Bangunan sarana peribadatan yang ada di Desa Banjar Negeri.

No	Bangunan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	7
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-

Sumber: Monografi Desa Banjar Negeri tahun 2023.

Dilihat dari tabel 3.6 diatas dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa Banjar Negeri beragama islam maka sarana peribadahan yang ada di Desa Banjar Negeri hanyalah masjid dan musholla.

C. Program Keluarga Harapan di Desa Banjar Negeri

1. Sejarah Program Keluarga Harapan di Desa Banjar Negeri

Berdasarkan hasil wawancara, kemiskinan di Desa Banjar Negeri masih mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa segala bentuk program pemerintahan masih belum berjalan dengan maksimal termasuk juga Program Keluarga Harapan (PKH), oleh sebab itu keefektivan suatu program dalam penanggulangan kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. PKH di Desa Banjar Negeri sudah berlangsung dari tahun 2012. PKH di salurkan kepada kelompok miskin bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Disamping itu, PKH juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang ada di negara ini.⁸¹



Gambar 3.1 Wawancara Dengan Aparatur Desa Banjar Negeri

Melalui PKH pemerintahan memberikan bantuan tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan Pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berat dan lansia di atas 70 tahun. Bantuan ini tidak diberikan

⁸¹ Wawancara Bapak Syahrurrozi, Aparatur Desa Banjar Negeri Pada Hari Selasa 13 Februari 2023.

hanya dengan Cuma-Cuma, penerima PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan serta penerima bantuan harus memenuhi komponen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Komponen penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan diberikan kepada maksimal anggota keluarga sesuai dengan kriteria dan komponen.
- b. Jika terdapat lebih dari tiga anggota keluarga dalam satu keluarga, maka bantuan PKH diberikan kepada komponen dengan nilai nominal terbesar.
- c. Ibu hamil termasuk dalam komponen, tetapi kehamilan keempat tidak termasuk dalam tambahan komponen kepesertaan.

Jumlah penerima manfaat PKH untuk rumah tangga miskin di Desa Banjar Negeri hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 156 RTM. Pada setiap tahunnya mengalami penambahan peserta PKH dan pengurangan peserta PKH yang sudah terdaftar PKH sejak awal digantikan dengan peserta PKH yang baru. oleh sebab itu keefektivan PKH di Desa Banjar Negeri perlu dilakukan penelitian, guna mengetahui apakah dengan adanya PKH di Desa Banjar Negeri dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada selama ini.

2. Implementasi PKH di Desa Banjar Negeri

Menurut Kepala Desa Banjar Negeri, bahwa seluruh dusun di Desa Banjar Negeri telah menerima bantuan PKH terhitung sejak tahun 2012. Fakta yang ditemukan di lapangan implementasi penetapan peserta penerima PKH di Desa Banjar Negeri tidak sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam implementasi pelaksanaan PKH masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan kesehatan dan Pendidikan untuk keluarga miskin. Hal ini tentunya kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan dan tidak meratanya distribusi dari Program PKH ini. PKH di Desa

Banjar Negeri masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tetapi belum mendapat bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SM salah satu peserta PKH menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2022 ini penyaluran PKH melalui kantor pos dan tidak lagi melalui ATM seperti yang telah dilakukan dalam beberapa tahun ini. Hal ini membuat peserta yang tidak memiliki kendaraan dan jarak rumah yang jauh dari kantor pos merasa keberatan karena harus mencari orang yang bisa dan mau untuk mengantarkannya. Hal ini terjadi karena tidak semua peserta memiliki kendaraan sendiri dan dapat mengendarainya”.

82



Gambar 3.2 Wawancara Dengan Ibu SM

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu AN salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

“pada saat pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta tidak mengikuti pertemuan. Sehingga peserta tidak mengerti ataupun memahami terhadap tujuan PKH dan pengalokasian sesungguhnya dana PKH, dikarenakan jarak tempat pertemuan dari Desa Banjar Negeri menempuh waktu 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan sepeda motor sehingga peserta yang tidak memiliki kendaraan tidak dapat mengikuti pertemuan

⁸² Wawancara dengan Ibu SM, 18 Februari 2023

rutin. Serta penentuan peserta yang kurang bijaksana membuat penerima bantuan tidak tepat sasaran”.⁸³

Hasil wawancara dengan ibu SL dan ibu HN peserta PKH, Menyatakan bahwa:

“PKH di Desa Banjar Negeri cukup membantu dalam biaya Pendidikan anak sekolah namun jika untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu belum cukup apalagi jika harus dikembangkan menjadi modal usaha, karena memiliki anak yang banyak dan kebutuhan pokoknya juga banyak. Jadi uang PKH cukup membantu dalam meringankan untuk biaya pendidikannya saja”.⁸⁴

Hasil wawancara dengan ibu UM, mengatakan bahwa:

“PKH ini sangat membantu untuk keluarga mereka yang dapat dikatakan sulit memenuhi untuk makan sehari-hari karena anak-anaknya yang masih kecil dan belum bisa bekerja tidak dapat membantu dalam mencukupi kebutuhannya. Dengan PKH mereka sangat bersyukur karena bisa mendapatkan bantuan tunai dan nontunai seperti seperti beras, sayuran, buah-buahan dan ayam dari pemerintah. Namun PKH ini tidak disalurkan setiap bulannya dan juga tidak tepat waktu bahkan telat sampai 1 atau 2 bulan”.⁸⁵

Hasil wawancara dengan ibu RS salah peserta PKH sejak tahun 2012, mengatakan bahwa:

“PKH saya sudah tidak keluar sekitar 6 bulan, dan tidak ada pemberitahuan dari ketua PKH ataupun pemerintahan Desa penyebab PKH saya tidak keluar lagi, saya juga tidak memiliki keberanian untuk menanyakan hal ini kepada pendamping PKH apakah saya memang sudah tidak dihapus dari program ini ataupun PKH saya masih tetap cair namun tidak diberikan kepada saya karena pernah ada kejadian yang seperti itu”.⁸⁶

Hasil wawancara dengan bapak MS salah satu peserta PKH, mengatakan bahwa:

⁸³ Wawancara dengan ibu AN, 18 Februari 2023

⁸⁴ Wawancara dengan ibu SL dan HN, 18 Februari 2023

⁸⁵ Wawancara dengan ibu UM, 20 Februari 2023

⁸⁶ Wawancara dengan ibu RS, 20 Februari 2023

“PKH tidak pernah cair sekitar 3 tahun dari tahun 2015, namun setelah mendapat masukan dari keluarga dan peserta PKH lainnya untuk mengecek transaksi kartu PKH tersebut dengan menggunakan buku tabungan di bank, ternyata PKH saya selama ini selalu cair namun diambil oleh pendamping PKH pada saat itu dan terbukti kini pendamping tersebut telah dipecat dan digantikan dengan pendamping yang baru, pendamping tersebut mengganti PKH yang selama ini diambilnya dengan beras bukan dengan uang itupun juga dicicil bukan langsung dibayarkan semua”.⁸⁷

Hasil wawancara dengan ibu SN salah satu peserta PKH, mengatakan bahwa:

“saya merasa keberatan jika pencairan PKH melalui E-warung dikarenakan menurut saya lebih rumit dibandingkan dengan mengambil langsung di kantor pos. karena kurangnya pemahaman saya tentang teknologi saat ini jadi saya mengumpulkan kartu PKH kepada ketua yang mengurus pencairannya, setiap orangnya di kenakan tarif 10 ribu atau lebih untuk membayar ongkos karena jarak Desa dengan E-warung yang lumayan jauh. Jadi, uang yang didapat dari PKH tidak semuanya menjadi milik saya karena harus dibagi dengan ketua PKH mereka memotong berapa dari uang tersebut”.⁸⁸

Wawancara dengan ibu TM dan EV selaku aparatur Desa Banjar Negeri, mengatakan bahwa:

“PKH di Desa Banjar Negeri sudah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh pemerintah, PKH juga sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak dapat melengkapi semua kebutuhannya. Pada setiap tahunnya selalu ada penambahan dan pengurangan peserta PKH, peserta yang terdaftar PKH sejak 2012 dan sudah tidak memiliki anak yang masih bersekolah maka digantikan dengan peserta yang baru yang masuk dalam

⁸⁷ Wawancara dengan bapak MS, 20 februari 2023

⁸⁸ Wawancara dengan ibu SN, 21 Februari 2023

kategori penerima PKH. Hingga saat ini PKH di Desa Banjar Negeri Sudah cukup efektif”.⁸⁹

Wawancara dengan ibu SM dan pak NS selaku ketua PKH di desa Banjar Negeri, mengatakan bahwa:

“tidak semua peserta PKH mengambil sendiri uang PKH saat pencairan namun ada juga yang mengumpulkan dengan ketua PKH dan mereka hanya menunggu dirumah saja tidak bolak-balik ke E-warung. Dengan begitu mereka dikenakan tarif 10 ribu/karung beras, jadi jika pencairannya untuk 3 bulan maka beras yang didapat berjumlah 3 karang dan untuk ongkos yang diberikan kepada ketua berarti 30 ribu. Itu sudah menjadi kesepakatan namun masih ada juga yang merasa keberatan jika dihitung perkarung”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut PKH di Desa Banjar Negeri belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya ketidaktepatan sasaran dalam pemilihan penerima bantuan PKH, ada yang memiliki rumah layak huni yang berlantai keramik dengan tembok yang sudah diplester dan di cat namun tetap menjadi peserta PKH tidak digantikan dengan masyarakat yang lebih membutuhkan lagi. Pemilihan peserta PKH juga belum sesuai karena banyak peserta PKH yang merupakan kerabat atau saudara dari aparaturnya yang mengurus PKH, jadi penentuan peserta PKH bukan hanya dari kriteria pemerintahan namun juga dipilih pribadi oleh pemerintahan Desa tersebut di Desa Banjar Negeri juga masih banyak terdapat masyarakat yang kurang memahami arti/tujuan dari PKH sehingga dalam pemanfaatannya kurang efektif dan efisien.

⁸⁹ Wawancara dengan ibu TM dan EV, 15 Februari 2023

⁹⁰ Wawancara dengan ibu SM dan Bapak NS, 20 Februari 2023

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berat dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia serta tidak mudah keluar dari persoalan kemiskinan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yaitu antara lain melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sebagainya.⁹¹

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1): “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya”.⁹²

Program keluarga harapan ini memfokuskan dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak RTM) dan kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun. Menurut teori human capital kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Jadi, apabila kualitas sumberdaya manusia rendah dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu

⁹¹ Imron Rosadi. “Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta,2017), h. 500.

⁹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 1 ayat 1

kemiskinan. Oleh karena itu, hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

Pada pelaksanaannya PKH di Desa Banjar Negeri baru terlaksana pada 2012 untuk wilayah Tanggamus, yang mana Desa Banjar Negeri merupakan bagian dari Kabupaten Tanggamus. Pada setiap kelurahan memiliki satu pendamping PKH untuk terlaksananya PKH dengan baik. Dalam hal ini untuk tercapainya kesuksesan PKH disuatu daerah harus memenuhi indikator efektivitas tercapainya PKH, berikut ini peneliti akan menguraikan hasil temuan lapangan efektivitas PKH berdasarkan pengukuran pada lima indikator efektivitas PKH sebagai berikut:

1. Indikator pemahaman program

Indikator pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pendamping PKH dan perangkat desa dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya mencakup tentang pemahaman program saja namun terdapat diskusi ataupun sharing antara pendamping pkh dengan penerima PKH. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH dan perangkat desa sudah cukup efektif, walaupun berada di daerah terpencil pendamping dan petugas PKH tetap memastikan bahwa sosialisasi diadakan setiap tiga bulan sekali serta memastikan KPM memahami dengan baik hak dan kewajiban serta sanksi yang didapat apabila melanggar kewajiban sebagai peserta penerima PKH.

2. Indikator Tepat Sasaran

Berdasarkan dari data sekunder yang telah dihimpun oleh penulis diketahui bahwa tingkat kebutuhan rata-rata sebagian masyarakat Desa Banjar Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pola Konsumsi Masyarakat Desa Banjar Negeri Tahun
2022

No	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (perbulan)
1	Kebutuhan pangan/makanan	Rp. 500.000
2	Kebutuhan sandang/pakaian	Rp. 200.000
3	Biaya Pendidikan	Rp. 400.000
4	Biaya kesehatan	Rp. 200.000
5	Pengeluaran lain (listrik, air dll)	Rp. 200.000

*Sumber: Hasil Wawancara Aparatur Desa Banjar Negeri
Tahun 2022*

Pada Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pangan Rp.500.000, pakaian Rp.200.000, pendidikan Rp.400.000, kesehatan Rp.200.000 dan biaya pengeluaran seperti kebutuhan listrik sebesar RP.200.000 tidak sebanding dengan tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan pendapatan rata-rata perbulan yang hanya mencapai Rp. 500.000-Rp1.000.000, hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Banjar Negeri adalah masyarakat miskin, dimana jumlah pendapatan yang mereka miliki tidak dapat mencukupi tingkat kebutuhan ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada peserta PKH yang dinyatakan tidak mampu/miskin ditemukan 3 dari 10 responden sudah beralih status menjadi keluarga sejahtera. Peralihan status RTM ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan pada keluarga tersebut sehingga mampu mencukupi kebutuhannya terutama kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan. Peralihan status ini dibuktikan dengan perubahan kondisi tempat tinggal yang telah berubah

menjadi rumah permanen, serta tercukupinya kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan serta kesehatan.

Sedangkan yang disebut keluarga miskin menurut BPS adalah sebagai berikut:

- a. luas bangunan peranggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 M².
- b. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
- c. Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- d. Fasilitas MCK belum tersedia.
- e. Sumber air minum bukan air minum bersih.
- f. Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- g. Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
- h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
- i. Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
- j. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
- k. Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik.
- l. Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
- m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
- n. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.⁹³

Berdasarkan tolak ukur keluarga miskin menurut BPS, di Desa Banjar Negeri ditemukan peserta PKH yang tidak termasuk dalam keluarga miskin seperti dijelaskan berikut ini Ibu MA Luas bangunan lebih dari 8 m², lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan petani, memiliki aset tetap (kebun dan 2 kendaraan bermotor). Ibu AZ Luas bangunan lebih dari 8 m², lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan IRT memiliki aset tetap (kebun, sawah dan 1 kendaraan

⁹³ Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan, (On-line) tersedia di: www.bps.go.id

bermotor) dan penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000, ibu SN memiliki Luas bangunan lebih dari 8 m², lantai rumah keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, memiliki sumber air bersih, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, pekerjaan pedagang, memiliki aset tetap (kebun).

Tidak efektifnya penetapan RTM penerima bantuan ini dikarenakan data yang digunakan untuk penetapan penerima bantuan ditentukan dengan data ditingkat nasional dengan menggunakan data pada tahun sebelumnya/ data yang digunakan tidak valid, sedangkan ketika ada peralihan status pada RTM di daerah harus melalui proses panjang agar bisa digantikan atau dihapus dari daftar penerima bantuan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pedoman umum PKH serta menjadikan penetapan RTM penerima bantuan kurang tepat sasaran. Melihat dari kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan peserta PKH di Kampung Bonglai belum tepat sasaran, selain adanya peserta yang beralih status menjadi keluarga sejahtera ditemukan pula peserta yang berasal dari keluarga sejahtera yang merupakan kerabat-kerabat dekat dari pejabat aparat desa. Hal ini jelas membuktikan masih dijunjungnya budaya nepotisme.

3. Indikator tepat waktu (setelah sosialisasi RTM mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai peserta serta mulai dilakukannya penyaluran dana kepada peserta PKH).

Pada tahap penyaluran dana dibutuhkan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah. Berdasarkan hasil wawancara pada 13 responden peserta PKH menjawab untuk ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pada tahap penyaluran dana sudah tepat waktu. Tahap penyalurannya pun dilakukan sesuai dengan pedoman umum. Namun terdapat pemotongan dana oleh pihak-pihak tertentu sehingga proses penyaluran dana PKH di Desa Banjar Negeri belum dilakukan dengan efektif. Adapun pengurangan jumlah dana/uang yang diterima oleh sebagian peserta adalah untuk pemotongan biaya transportasi oleh ketua PKH yang dibentuk dari beberapa orang, rata-rata 1 orang ketua PKH mewakili untuk 20 orang peserta. Ketua PKH tersebut

melakukan pencairan dana di e-warung untuk biaya transportasi di patok 10 ribu persatu kali pencairan, jika pencairan pada saat itu untuk 2 bulan maka dana yang dipotong sebesar 20 ribu. Dikarenakan lokasi e-warung berada dikecamatan jauh dari Desa Banjar Negeri sedangkan peserta ada yang tidak memiliki kendaraan maka mereka lebih memilih untuk memberikan kepada ketua PKH yang mengurus pencairannya dan mereka menerima dana sesuai dengan jumlah yang sudah dikurangi biaya transportasi.

4. Indikator tercapainya tujuan (dana yang diterima diperuntukkan untuk kebutuhan Pendidikan dan kesehatan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa dana PKH yang mereka terima selain digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan dana PKH juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (biaya hidup sehari-hari), berdasarkan hasil wawancara hal ini dikarenakan pendapatan RTM yang sangat rendah sehingga para RTM kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan harus memanfaatkan dana PKH untuk membantu memenuhi kebutuhan selain pendidikan dan kesehatan. 12 responden ini menyatakan bahwa mereka terpaksa menggunakan sebagian dana PKH untuk kebutuhan lainnya karena minimnya pendapatan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana PKH oleh peserta kurang tepat sehingga manfaatnya terhadap pendidikan dan kesehatan kurang efektif.

5. Indikator perubahan nyata (meningkatnya kualitas Pendidikan dan kesehatan)

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan seluruh responden menyatakan bahwa adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan setelah mereka terdaftar sebagai peserta PKH (meskipun banyak penyalahgunaan dana PKH oleh peserta PKH). Hal ini dibenarkan oleh pendamping PKH Desa Banjar Negeri, beliau mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PKH hampir seluruh anak yang dalam masa pendidikan dan mendapat bantuan PKH mereka memenuhi kewajiban mereka

yakni mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar aktif. Selain itu tingkat kehadiran ibu hamil dan balita dalam memerikasakan kesehatannya juga meningkat. PKH sangat membantu kesulitan masyarakat terutama di Desa Banjar Negeri, dari 13 responden dalam penelitian semuanya ingin agar PKH tetap dilanjutkan karena program ini sangat membantu masyarakat dalam membantu mereka mengantarkan anak-anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mampu membantu mencukupi kebutuhan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Walaupun bagi sebagian peserta dana PKH yang mereka terima masih sangat minim sehingga mereka harus tetap bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Tabel 4.2
Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Banjar Negeri Tahun 2019-2022

No	Jenis Bantuan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan	104	116	125	129
2	Kesehatan	15	13	9	12
3	Lansia	9	12	10	11
4	Disabilitas	2	2	4	4
	Total Jumlah Penerima	139	143	148	156

Sumber: Wawancara Dengan Aparatur Desa Banjar Negeri

Berdasarkan tabel 4.2 di atas bahwa keluarga penerima PKH di Desa Banjar Negeri selalu mengalami kenaikan, dilihat dari tahun 2019 KPM penerima bantuan PKH berjumlah 139 yang terdiri dari bantuan Pendidikan berjumlah 104 KPM, bantuan kesehatan 15 KPM, bantuan lansia 9 KPM dan bantuan disabilitas berjumlah 2 KPM. Pada tahun 2020 KPM penerima PKH bertambah menjadi 143 KPM, yang terdiri dari bantuan Pendidikan 116 KPM, bantuan kesehatan 13 KPM, bantuan lansia 12 KPM dan bantuan disabilitas berjumlah 2 KPM, pada tahun 2020 ini jenis bantuan Pendidikan dan lansia yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah penerima PKH sebanyak 148 KPM yang terdiri dari bantuan Pendidikan sebanyak 125 KPM, bantuan kesehatan 9

KPM, bantuan lansia 10 KPM dan bantuan disabilitas 4 KPM, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya pada jenis bantuan Pendidikan. Lansia dan disabilitas. Pada tahun 2022 jumlah penerima PKH sebanyak 156 KPM, yang terdiri dari bantuan Pendidikan berjumlah 129 KPM, bantuan kesehatan 12 KPM, bantuan lansia 11 KPM dan bantuan disabilitas berjumlah 4 KPM, pada tahun 2022 ini jenis bantuan Pendidikan, kesehatan dan lansia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan 5 indikator diatas bahwasanya pelaksanaan PKH di Desa Banjar Negeri dapat diartikan belum terlaksana dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dari kelima indikator efektivitas PKH hanya tiga indikator saja yang mampu terpenuhi dengan baik yaitu pada indikator pemahaman program, indikator tepat waktu dan indikator perubahan nyata. Sedangkan indikator tepat sasaran dan indikator tercapainya tujuan masih belum efektif. Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa pengentasan kemiskinan di Desa Banjar Negeri melalui PKH belum efektif, selama 11 tahun berjalan PKH mampu meningkatkan partisipasi Pendidikan dan kesehatan peserta. Namun, selama 11 tahun PKH belum mampu mengcover seluruh keluarga miskin yang ada di Desa Banjar Negeri, penggantian peserta PKH bukan karena sudah termasuk keluarga sejahtera namun karena anak dalam keluarga tersebut sudah selesai bersekolah atau tidak melanjutkan lagi pendidikannya dan juga karena peserta PKH tersebut sudah terdaftar sejak tahap pertama hingga saat ini tidak pernah digantikan. Terlebih lagi stimulus dana PKH alokasinya hanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan bukan digunakan untuk modal usaha, sehingga PKH hanya mampu mengurangi beban pendidikan dan kesehatan RTM. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok membutuhkan modal/lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan pendapatan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa PKH belum mampu menekan/mengentaskan tingkat kemiskinan di Desa Banjar Negeri.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Desa Banjar Negeri melalui PKH memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat tetapi seiring berjalannya program PKH di Desa Banjar Negeri belum mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada

dimasyarakat. Hanya saja PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan tingginya tingkat kemiskinan di Desa Banjar Negeri.

B. Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, Pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial. Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbuan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan jaminan sosial. Tanggung jawab pemerintah Indonesia pada rakyatnya tercermin pada diberlakukannya perlindungan sosial dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini. Program terbaru perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2007. PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH.

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kezoliman dan arogansi. Dalam implementasinya PKH dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah bagaimana manusia menghadirkan Tuhan dalam setiap aktifitasnya sehingga manusia senantiasa melakukan setiap kegiatannya berdasarkan pada ajaran Tuhan. Maka dalam program keluarga harapan dapat dikatakan bahwa prinsip ini mengacu pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam implementasi PKH harus dipertanggungjawabkan.⁹⁴

Berkaitan dengan prinsip ini yaitu seperti tugas pemerintah pusat dalam mengelola data. Seperti yang terjadi di Desa Banjar Negeri pendamping rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk selalu memantau perkembangan perekonomian masyarakatnya. Selain pertanggung jawaban dari pemerintah pusat, pertanggung jawaban dari peserta PKH dalam hal ini juga sangat penting untuk dilaksanakan. Seperti halnya peserta PKH pada komponen pendidikan harus memenuhi tanggung jawabnya dengan selalu hadir disekolah dan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Lalu peserta PKH dalam komponen kesehatan harus rutin melakukan kewajibannya dengan rutin datang ke posyandu bagi balita dan melakukan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil. Begitu pula dengan peserta PKH komponen lansia yang harus memanfaatkan dana bantuan sebaik mungkin untuk kelangsungan hidupnya.

Berkaitan dengan prinsip ini, maka program keluarga harapan di Desa Banjar Negeri dapat dikatakan terlaksana sesuai dengan prinsip tauhid. Hal tersebut sudah sesuai baik dari sisi pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan.

2. Keadilan

⁹⁴ Aqbar and Iskandar, "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam."

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain.⁹⁵ Pada penelitian ini PKH di Desa Banjar Negeri belum menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penentuan RTM di Desa Banjar Negeri masih menjunjung tinggi budaya nepotisme.

Keadilan adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.

Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl ayat 90)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa: Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan anantara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT.

Pada surat An-Nahl ayat 90 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menekankan kita selaku umat manusia berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar distribusi kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian pemerintah dimana dalam

⁹⁵ Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*.

implementasinya PKH di Desa Banjar Negeri termasuk kurang tepat sasaran dalam menentukan peserta penerima bantuan, sehingga yang mendapat bantuan PKH bukan sepenuhnya kaum miskin melainkan orang yang mampu/kaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada program PKH, terutama di Desa Banjar Negeri. Jadi implementasi PKH di Desa Banjar Negeri dalam perspektif Ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan kurang efektif karena belum memenuhi nilai keadilan.

3. Kenabian (*Nubuwwah*)

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang memiliki prinsip Nubuwwah seperti yang dibawa oleh Rasulullah yaitu *Siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathanah* (terpercaya). sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Muddassir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.⁹⁶ (QS. Al-Muddassir ayat 38)

Dalam tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Muddassir ayat 38 menjelaskan bahwa: Allah SWT memberitahukan bahwa: “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. Yakni bergantung kepada amal perbuatannya sendiri kelak dihari kiamat, demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Pada surat Al-Muddassir ayat 38 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa setiap diri memiliki tanggung jawab terlebih kepada pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang di pimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi

⁹⁶ Departemen Agama RI, Op. Cit. hlm. 575

tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Dalam implementasinya PKH di Desa Banjar Negeri belum ada tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, RTM penerima bantuan ditentukan berdasarkan data-data lama tanpa adanya pembaharuan terlebih dahulu, sehingga terdapat masyarakat yang sudah beralih status sosialnya namun masih saja mendapat bantuan PKH karena di dalam data pemerintah masih tergolong sebagai keluarga miskin sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin tidak termasuk kedalam peserta penerima bantuan dengan alasan belum terdata dan akan mendapat bantuan berikutnya. Jadi dalam hal ini pengimplementasian PKH belum terealisasi dengan baik karna belum adanya tanggung jawab secara penuh para petugas/pengelola program terhadap masyarakat.

4. *Khalifah*

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemberi mandat kekhilafahan, Allah SWT. Sebagai wakil Allah dimuka bumi, maka manusia harus menjalankan amanat sesuai yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Allah SWT telah memberikan sumber daya yang diperoleh oleh manusia dimuka bumi, oleh karena itu manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam suatu negara tugas kekhilafahan merupakan tanggung jawab pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan rakyat suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintahnya. Pemerintah dalam hal ini harus mengutamakan kepentingan rakyatnya, tetapi rakyat juga harus memenuhi kewajibannya terhadap negara seperti membayar pajak dan lain-lain. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan menentukan pelaksanaan dari kebijakan tersebut. dalam hal ini, maka pemerintah bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan pada departemen sosial pusat kemudian dilanjutkan hingga pemerintah daerah/dinas sosial

disetiap kota ataupun kabupaten. Kemudian setiap kota/kabupaten ditentukan pendamping program keluarga harapan yang bertugas disetiap desa. Para pendamping ini merupakan penerima amanat dari pemerintah untuk berhadapan langsung dengan masyarakat miskin, memberikan mereka arahan tentang program, melakukan pendataan anggota keluarga KPM PKH yang berhak mendapat bantuan hingga dilakukannya pencairan dana. Dalam hal tersebut, seorang pendamping harus benar-benar menjalankan tugasnya dalam pendampingan dengan baik agar para peserta PKH ataupun RTSM mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan. Seperti yang terjadi di Desa Banjar Negeri, menurut pengamatan dan penelitian yang dilakukan, pendamping PKH Desa Banjar Negeri sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan tidak sewenang-wenang.

Sehingga para peserta PKH dapat memperoleh bantuan mereka sesuai komponen keluarga penerima dan setelah KPM melaksanakan kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Bungur sesuai dengan prinsip khalifah dalam ekonomi Islam.

Jaminan sosial dalam Islam merupakan huquq Allah, atau sebuah kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”*.⁹⁷ (QS. An-Nisa ayat 9)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan bahwa: Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

⁹⁷ Departemen Agama RI, Op. Cit. Hlm. 78

bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat pada ahli warisnya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. Hendaknya ia bertaqwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskan kejalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. Sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta.

Pada surat An-Nisa ayat 9 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam keadaan kelaparan/kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya hubungan baik antar individu, masyarakat dan pemerintah. Jaminan sosial juga menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin sehingga dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu memenuhi kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan sesama muslim. Seperti halnya PKH di Desa Banjar Negeri yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin, sehingga mereka mampu mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

5. Prinsip *Al-Falah* (hasil)

Al-falah (hasil) dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan. Islam mengajarkan agar keadilan dapat ditegakkan sehingga dapat menghasilkan sebuah tatanan di dalam masyarakat yang harmonis dan tidak membedakan dalam aspek kehidupan. Dalam program keluarga harapan di Desa Banjar Negeri belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan penerapan PKH di Desa Banjar Negeri belum dapat mengentaskan kemiskinan yang ada.

Berdasarkan analisis pada kondisi diatas bahwasanya implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa

Banjar Negeri dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam kurang dalam berlaku adil dan bertanggung jawab, PKH hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena masih banyak ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan dan tidak tepat gunanya dana yang diterima anggota sehingga manfaat dari PKH dapat dikatakan tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran (kurang efektif).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan di Desa Banjar Negeri. PKH di Desa Banjar Negeri yang dimulai sejak tahun 2012 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya adalah di Desa Banjar Negeri kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi/mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Banjar Negeri.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam. Dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu Tauhid, Adil, *Nubuwwah*, *Khalifah* dan *Al-falah*, dalam implementasinya PKH masih sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan oleh petugas PKH di Desa Banjar Negeri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Petugas PKH/pendamping PKH harus lebih mengarahkan kepada kedepannya agar lebih memfokuskan pada proses

penyadaran RTM agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pemerintah.

2. Kepada pemerintahan Desa agar bisa menjadi pemimpin yang amanah dan adil dalam menjalankan tugasnya terutama dalam penentuan peserta penerima PKH.